



UNIVERSITAS IPWIJA

SK Kemendikbudristek RI No. 627/E/O/2022

Jl. H. Baping No.17 Kel. Susukan, Kec. Ciracas

Jakarta Timur. 13750 Telp. 021-22819921

E-mail : contact@ipwija.ac.id <https://ipwija.ac.id>

 UNIVERSITAS IPWIJA

No. : 062/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2024
Perihal : Narasumber, Pendamping dan Pemberi Materi
Lampiran : -

Kepada Yth.
Samekto Ambinonuso, S.H., M.E.
Kepala Bagian Set. Komite IV
Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Komite IV DPD RI No.PU.01/331/DPDRI/VI/2024 tanggal 8 Mei 2024, yaitu akan diadakannya kegiatan, dan perihal tersebut di atas dengan ini Kepala LP2M Universitas IPWIJA menugaskan:

1. Edi Wibowo, S.T., M.M. (NIDN: 0307027801)
- 2.Rr. Titin Maidarti, S.E., M.M. (NIDN: 0302056003)

Untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 16 Mei 2024
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : The Groove Suites, Kuningan, Jakarta Pusat.
Tema :“ Peer Review RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah.”

Setelah pelaksanaan kegiatan Dosen yang ditugaskan diwajibkan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada pemberi tugas (LP2M Universitas IPWIJA).Mohon bantuan penanggungjawab kegiatan membantu menyediakan berkas yang diperlukan untuk pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 10 Mei 2024



Dr. Ir. Titing Widyastuti, M.M.
Kepala LP2M Universitas IPWIJA



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Senayan Jakarta 10270

Nomor : PU.01/331/DPDRI/VI/2024

Jakarta, 8 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Sebagai Narasumber
Dalam kegiatan *Peer Review*
RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah

Kepada Yth.

Bapak Edi Wibowo, MM

Dosen Universitas IPWIJA Jakarta

di

Jakarta

Berdasarkan hasil rapat Pleno Komite IV DPD RI mengenai rencana kegiatan *Peer Review* RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah, bersama ini kami mengundang Bapak untuk hadir sebagai narasumber dalam kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis 16 Mei 2024

Pukul : 08.00 WIB s.d. selesai

Acara : *Peer Review* RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah

Tempat : The Groove Suites, Kuningan
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan konfirmasi kehadirannya pada acara dimaksud. Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Komite IV DPD RI, dengan alamat lantai 1 Gedung B DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta, telepon (021) 57897358.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Bagian Set. Komite IV,

Samekto Ambinonuso, S.H., M.E.

NIP. 197702232002121004



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Senayan Jakarta 10270

Nomor : B/PU.01/830/DPDRI/VI/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Ucapan Terima Kasih

Jakarta, 6 Juni 2024

Kepada Yth.
Bapak Edi Wibowo, M.M
Dosen Universitas IPWIJA Jakarta
di
Jakarta

Dengan hormat, sehubungan dengan selesainya kegiatan *Peer Review* atas RUU tentang pengelolaan Aset Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024, kami berkenan menyampaikan Terima Kasih atas kehadiran Bapak sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

Demikian kami sampaikan, semoga kerjasama yang baik ini dapat terus terjalin.



Kepala Bagian Set. Komite IV,

Samekto Ambinonuso, S.H., M.E.

NIP. 197702232002121004



**KEGIATAN PEER REVIEW RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU)
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Pengelolaan Aset Daerah / Barang Milik Daerah (BMD)

EDI WIBOWO., ST.,MM.

Dosen Universitas IPWIJA, Jakarta

The Groove Suite, Kuningan Jakarta , 16 Mei 2024

Pengelolaan Aset Daerah

Apa itu Aset?

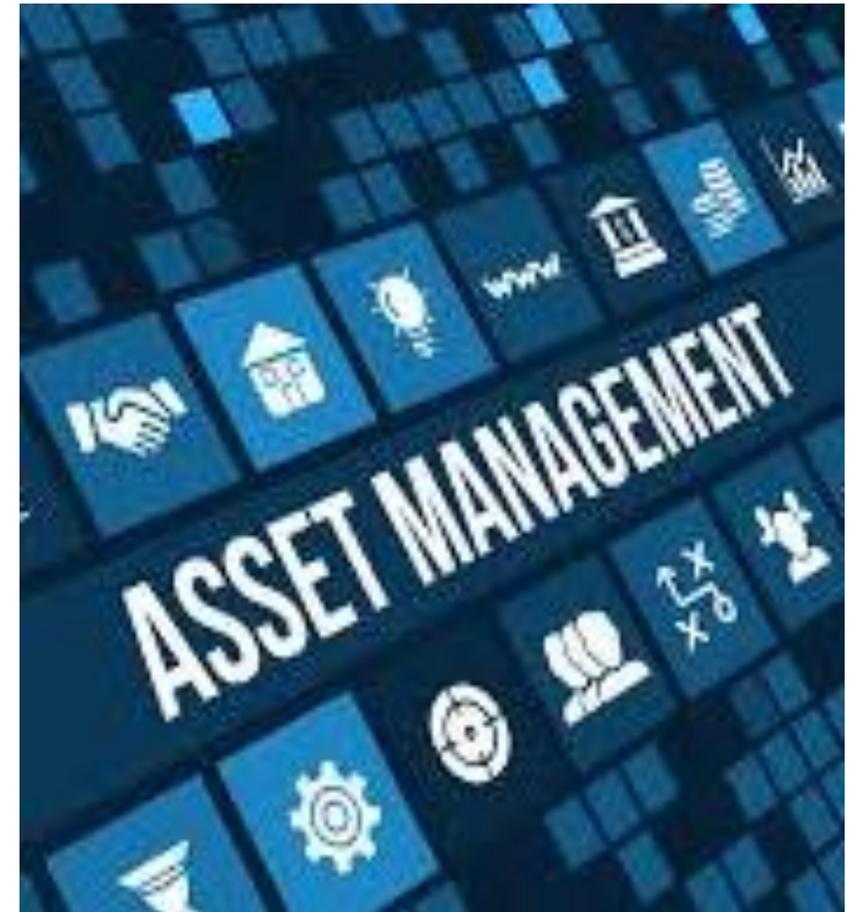
- Sumber daya ekonomi yang dimiliki dari kegiatan ekonomi di masa lalu
- Memberi manfaat ekonomi atau keuntungan sosial yang akan diperoleh di masa datang
- Mempunyai nilai uang
- Termasuk sumber non keuangan yang diperlukan untuk pelayanan publik
- sumber yang dipertahankan atau dipelihara sehubungan dengan nilai sejarah atau budaya

Aset Daerah

- Aset lancar
 - Uang kas
 - Uang di bank
 - Piutang
 - **Persediaan**
- Investasi
- Aset tetap
 - Tanah
 - **Mesin dan Peralatan**
 - **Gedung dan Bangunan**
 - Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Aset Tetap lainnya
 - Konstruksi dalam pengerjaan
- Aset Lainnya
 - Aset tak berwujud
 - Tagihan penjualan angsuran
 - Tuntutan ganti rugi
 - Kemitraan dengan pihak ketiga
 - Aset lain-lain

Mengapa BMD perlu dikelola ?

1. Kejelasan status kepemilikan BMD
2. Inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai BMD
3. Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan PAD.
4. Antisipasi kondisi BMD dalam fungsi pelayanan publik
5. Pengamanan barang daerah
6. Dasar penyusunan neraca.
7. Kewajiban untuk melaporkan kondisi dan nilai BMD secara berkala
8. Sebagai pertanggung jawaban pimpinan (pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran)



Pengelolaan Aset Daerah

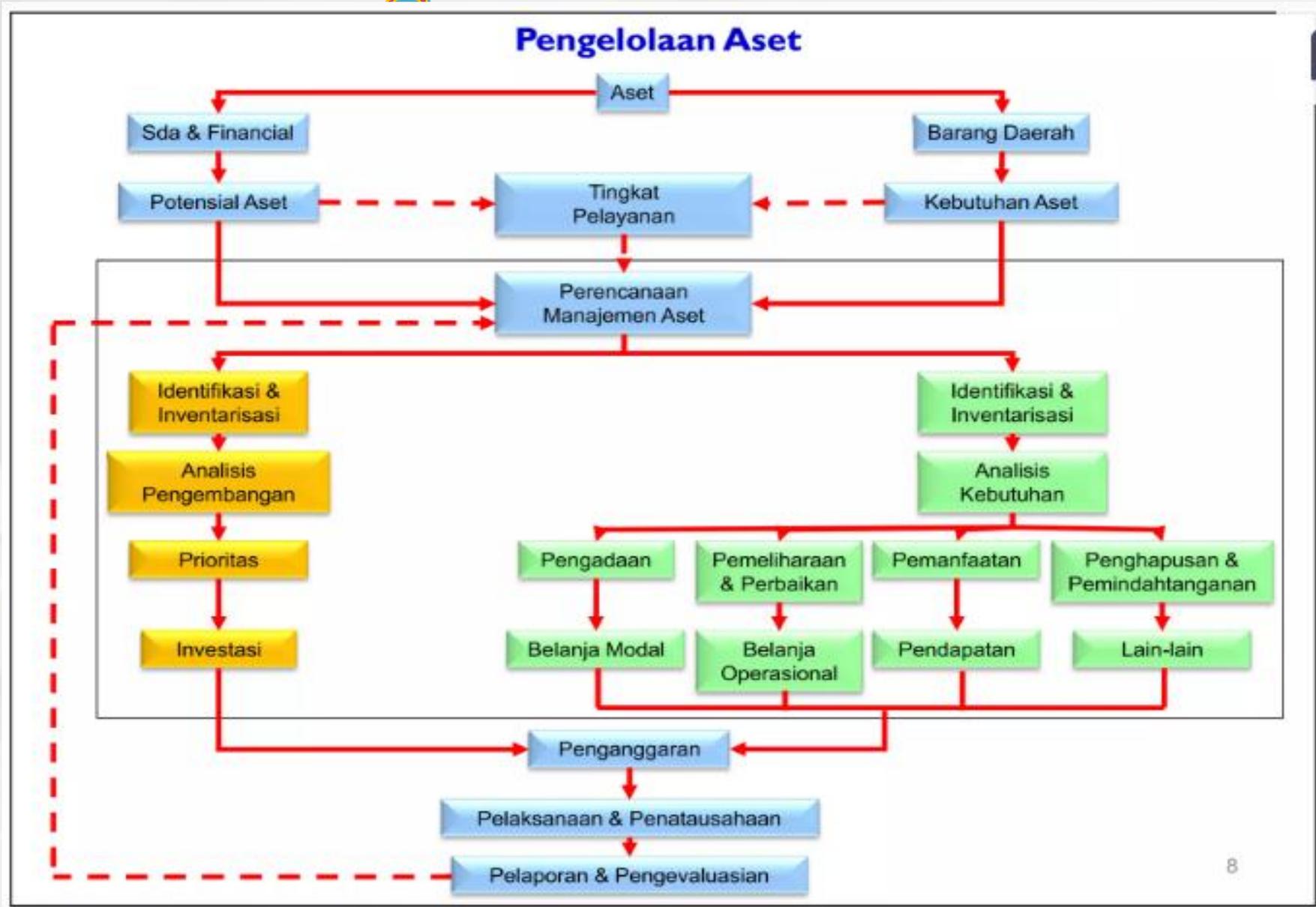
Latar Belakang

- Reformasi bidang keuangan negara mencakup reformasi bidang pengelolaan barang milik/kekayaan negara (UU 1/2004 tentang perbendaharaan negara)
- Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMD
 - Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikannya
 - Belum tersedianya database yang akurat dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah.
 - Pengaturan yang ada belum memadai dan terpisah-pisah
 - Kurang adanya persamaan persepsi dalam hal pengelolaan BMN/D

Dasar Hukum Pengelolaan BMD

- UU No. 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara
- PP No. 24/2005 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan
- PP No. 58/2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah
- PP No. 6 /2006 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah
- PP No. 38/2008 ttg Perubahan atas PP No. 6/2006
- Keppres 80/2003 ttg Pedoman Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa
- Kepmendagri 12/ 2003 ttg Pedoman Penilaian Barang Daerah
- Kepmendagri 153/2004 ttg Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan; dan
- Permendagri 13/2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri 17/2007 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Aset Daerah



Pengelolaan Aset Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah



Pengelolaan Aset Daerah

Pejabat Pengelolaan BMD



Pengelolaan Aset Daerah

Pemanfaatan



Pengelolaan Aset Daerah



